



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MENJAGA SITUS WARISAN DUNIA

Dinar Wahyuni
Peneliti Madya
dinar.wahyuni@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia memiliki sembilan warisan dunia yang terdiri dari lima warisan budaya dan empat warisan alam. Warisan budaya dunia di Indonesia adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Situs Manusia Purba Sangiran, Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto, dan Sistem Subak Bali. Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Lorentz, dan Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera merupakan warisan alam yang diakui sebagai warisan dunia secara bertahap sejak tahun 1991 hingga 2004.

Hadirnya pandemi Covid-19 memberikan dampak berkelanjutan bagi situs warisan dunia di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020, ruang gerak masyarakat praktis dibatasi hingga waktu yang tidak ditentukan. Kondisi ini juga dialami oleh situs warisan dunia. Menurut catatan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), sebagian besar situs warisan dunia juga ditutup akibat pandemi. Penutupan dilakukan pada 71 persen dari situs warisan dunia hingga Februari lalu. Bahkan, saat kasus Covid-19 melonjak pada tahun 2020, penutupan situs warisan dunia mencapai 90 persen.

Sama seperti negara lainnya, Indonesia juga menutup obyek warisan budaya dunia di tengah pandemi. Candi Borobudur dan Candi Prambanan melakukan buka dan tutup kawasan sesuai dengan kebijakan pemerintah seiring perkembangan kasus Covid-19. Penutupan lokasi secara berkala juga dilakukan oleh pemerintah pada warisan alam dunia seperti Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Penutupan dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 di destinasi wisata.

Penutupan destinasi wisata tentunya memberikan dampak berkelanjutan bagi situs warisan dunia. UNESCO mencatat beberapa ancaman berkelanjutan bagi warisan dunia di tengah pandemi. *Pertama*, kerusakan. Perusakan secara sengaja berpotensi terjadi di tengah terbatasnya aktivitas pemantauan akibat pembatasan ruang gerak. Selain itu, kerusakan secara tidak sengaja juga berpotensi terjadi di tengah minimnya aktivitas konservasi selama pandemi. Minimnya perawatan di tengah penutupan selama pandemi juga dikhawatirkan berdampak pada munculnya tumbuhan liar yang dapat merusak beragam situs.

Kedua, eksploitasi secara ilegal. Penggalan hingga pencurian menjadi ancaman yang sulit untuk diawasi di tengah sepi jumlah wisatawan yang berkunjung. Bagi Indonesia yang memiliki banyak warisan budaya, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk merawat dan menjaga situs warisan dunia. Dari sisi ekonomi, penutupan situs warisan dunia juga dapat memberikan efek ganda dengan penutupan kawasan pariwisata di wilayah sekitar.

Dalam perkembangannya, penurunan jumlah kasus Covid-19 diikuti dengan pembukaan sejumlah situs warisan dunia. Demi menjaga kelestarian sejarah dan budaya nusantara, pemerintah menetapkan kuota pengunjung pada sejumlah situs warisan dunia. Seperti di Candi Borobudur, kuota harian untuk pengunjung yang dapat naik sampai ke puncak teratas candi dibatasi.

Keputusan ini diambil mengingat sebelum pandemi, pengunjung Candi Borobudur rata-rata mencapai jumlah 10.000 wisatawan per hari. Banyaknya wisatawan yang naik ke candi menyebabkan batuan tangga candi menjadi aus. Kerumunan pengunjung juga sulit diawasi sehingga vandalisme tidak dapat dihindari.

Begitu juga Taman Nasional Komodo. Tren pengunjung yang cenderung meningkat, mendorong wacana pembatasan kuota pengunjung Taman Nasional Komodo. Hal ini menimbulkan polemik di sejumlah kalangan masyarakat karena diterapkan ketika pariwisata sedang bangkit dari pandemi Covid-19. Masyarakat di sekitarnya juga merasa kebangkitan pariwisata menjadi momentum peningkatan ekonomi.

Satwa komodo merupakan salah satu warisan alam dunia yang memiliki *outstanding universal value* tinggi. Oleh karena itu, kelestariannya perlu dijaga, baik kelestarian ekosistem maupun kelestarian satwa itu sendiri. Hal ini yang menjadi pertimbangan perlunya pengaturan pengunjung dengan sistem pembatasan kuota pengunjung.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait situs warisan dunia yang perlu dijaga kelestariannya. Komisi X DPR RI perlu meminta pemerintah dan pemerintah daerah terus berkoordinasi dalam pengelolaan kawasan konservasi dan pariwisata secara seimbang termasuk pengaturan pembatasan kuota pengunjung sesuai kapasitas ideal, perilaku pengunjung, dan rencana sirkulasi pengunjung. Komisi X DPR RI perlu meminta pemerintah untuk menerapkan kebijakan kuota pengunjung dengan sistem digitalisasi. Dalam penerapan layanan kunjungan secara digital, baik dalam proses *booking online* maupun *e-ticketing* dapat dilakukan secara bersama-sama dengan pihak terkait. Komisi X DPR RI perlu mengingatkan pemerintah agar pelestarian situs warisan dunia tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, Komisi X DPR RI mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk kembali mengalokasikan anggaran perlindungan dan pelestarian situs warisan budaya setelah dua tahun sebelumnya anggaran difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Sumber

kemdikbud.go.id, 10 September 2019;
Kompas, 21 Juli 2021, 12 Agustus 2021, 5 Juli 2022, 7 Juli 2022;
kompas.com, 30 Juni 2022;
menlhk.go.id, 27 Juni 2022;
republika.co.id, 5 Juli 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.



©PuslitBK2022